

PERTEMPURAN KARANG KEDAWUNG 1949: GUGURNYA LETNAN KOLONEL MOCHAMMAD SROEDJI

Ratna Endang Widuatie

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
Jl. Kalimantan No. 37, Sumbersari, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

Abstrak

Artikel ini memaparkan perjuangan Letnan Kolonel Mochammad Sroedji, Komandan Brigade III/Damarwulan pada masa Perang Kemerdekaan. Sroedji adalah mantan perwira pasukan sukarela Pembela Tanah Air pada masa pendudukan Jepang. Semangat perjuangan yang kuat pada masa awal kemerdekaan mendorong pemuda-pemuda seperti Sroedji bergabung dengan tentara Republik yang masih mencari format ideal sebagai angkatan bersenjata. Sebagai komandan satuan di tingkat brigade, peran Sroedji dalam perjuangan di front Jawa Timur memberikan kontribusi penting bagi kedaulatan Indonesia. Dua kali Agresi Militer Belanda menjadi ajang pembuktian kepemimpinan Sroedji menghadapi kesulitan persenjataan, isu profesionalisme prajurit, hubungan sipil-militer, dan kekurangan logistik. Letnan Kolonel Mochammad Sroedji gugur dalam Pertempuran Karang Kedawung, 8 Februari 1949.

Kata kunci: Sroedji, TNI, perjuangan, kemerdekaan, Karang Kedawung.

THE BATTLE OF KARANG KEDAWUNG 1949: GUGURNYA LETNAN KOLONEL MOCHAMMAD SROEDJI

Abstract

This article describes about struggle of Lieutenant Colonel Mochammad Sroedji, Commander, 3rd Brigade "Damarwulan" during the War of Independence. Sroedji was a former volunteer officer of Defenders of the Homeland during the Japanese occupation. The spirit of struggle in the early days of independence prompted youth like Sroedji to join the Republican armed forces, that were still looking for ideal format. As brigade-level commander, Sroedji has important role in East Java's front that significantly contributed to Indonesian sovereignty. Twice Dutch Military Aggression showing Sroedji's great leadership under lack of weapons and ammunitions, soldier professionalism issue, civil-military relation, and logistical shortage. Lieutenant Colonel Mochammad Sroedji died in the Battle of Karang Kedawung, February 8, 1949.

Keywords: Sroedji, TNI, struggle, independence, Karang Kedawung.

I. PENDAHULUAN

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 membawa Indonesia ke dalam situasi baru, yaitu sebagai negara merdeka di tengah ancaman kembalinya penjajahan bangsa asing. Pemimpin Republik lantas mengumumkan pembentukan tentara nasional setelah melalui fase yang cukup berat. Pembentukan tentara nasional menghadapi tantangan bukan saja dari Belanda, namun juga dari internal Indonesia sendiri. Segera setelah terbentuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengalami ujian yang cukup berat. Situasi yang serba sulit justru menunjukkan keperwiraan para komandan satuan-satuan TNI dalam mengorganisir pasukannya dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan Republik Indonesia.

Letnan Kolonel Mochammad Sroedji adalah salah satu komandan satuan TNI yang mendapat kepercayaan besar dari komando tertinggi. Satuan yang dipimpin Letkol Sroedji, Brigade III/Damarwulan harus berjuang mempertahankan wilayah Besuki di bagian timur Pulau Jawa yang menjadi salah satu target utama serangan Belanda dalam Agresi Militer II. Keperwiraan Letkol Sroedji diuji saat harus memimpin pasukannya melaksanakan perintah wingate action dalam kondisi serba sulit, bahkan A.H. Nasution menuliskan mengenai brigade ini, "*yang ternyata lebih miskin daripada kesatuan-kesatuan yang tidak pernah mengenal*

penghijrahan.” (Nasution, 1991:305).

Kepemimpinan Letkol Sroedji adalah gabungan dari kecerdasan, keteguhan hati, moral juang, sikap ikhlas dan jiwa patriot yang tertempa zaman. Sebagai mantan perwira Pembela Tanah Air (PETA) pada zaman Jepang, Sroedji memilih “jalan pedang” dalam mewujudkan pengabdianya kepada bangsa dan negara. Riwayat hidup Letkol Sroedji yang tergolong singkat adalah tipikal perjuangan pemuda yang rela meninggalkan dan menanggalkan kepentingan pribadinya untuk memenuhi panggilan bangsanya. Sejak zaman Jepang, Sroedji telah menunjukkan jiwa patriotnya dengan meninggalkan profesi mantri kesehatan, juga anak dan istrinya di Jember untuk mengikuti pendidikan PETA di Bogor. Setelah Indonesia merdeka, lagi-lagi keluarganya ditinggalkan ke medan juang Pertempuran 10 November. Negara kembali memanggil untuk terjun ke front Karawang-Bekasi. Pulang untuk kembali bertempur mempertahankan wilayah Republik di Besuki, sebelum kembali berangkat memenuhi panggilan tugas memadamkan pemberontakan PKI Madiun 1948.

Agresi Militer II Belanda membuat Letkol Sroedji dan Brigade III/Damarwulan mendapat perintah *wingate action*. Keluarganya kembali ditinggalkan untuk memimpin pasukannya kembali ke basis di Besuki. Tugas adalah tugas, sampai akhirnya sebagai suami dan ayah, Sroedji tidak pernah kembali pada keluarganya. Pertempuran Karang Kedawung tanggal 8 Februari 1949 menjadi palagan pamungkas dimana Letnan Kolonel Mochammad Sroedji gugur.

Tulisan ini berusaha menelusuri jejak perjuangan Letnan Kolonel Mochammad Sroedji. Sebagai kajian ilmiah, tulisan ini tidak bermaksud sebagai upaya kultus individu ataupun mengagung-agungkan secara personal. Maksud dari tulisan ini adalah mengangkat kisah perjuangan Letkol Sroedji sebagai refleksi dan introspeksi bagi generasi penerus, khususnya di kalangan intelektual untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme sebagai warga negara. Gagasan utama dari tulisan ini adalah menjawab pertanyaan, bagaimanakah perjuangan Letnan Kolonel Mochammad Sroedji dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan di atas digunakan metode penelitian sejarah yang relevan dengan permasalahan. Metode penelitian sejarah terdiri dari tahapan heuristik atau pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi dan historiografi (Kuntowijoyo, 2005:90). Pengumpulan sumber menghasilkan data primer maupun sekunder, dimana keduanya saling melengkapi satu sama lain. Data diperoleh dari Dewan Harian Cabang 45 (DHC 45) Jember, Legiun veteran Republik Indonesia (LVRI) Jember, Dinas Sejarah KodamV/Brawijaya, Museum PETA Bogor, studi pustaka, koleksi pribadi keluarga mendiang Letnan Kolonel Mochammad Sroedji khususnya Ibu Irma Devita, arsip wawancara koleksi Saudara R.Z. Hakim, S.S, arsip militer Belanda/NIMH/Pusat Intelejen Marinir Belanda di Den Haag, koleksi Museum Broenbeek.

Data yang terkumpul kemudian masuk dalam tahapan kritik sumber. Menurut Daliman (2012:65) bahwa kritik sumber adalah menguji atau validasi terhadap sumber yang telah dihimpun. Kritik sumber terbagi menjadi kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal digunakan untuk menguji keaslian sumber, sedangkan kritik internal digunakan untuk menguji kredibilitas dan reliabilitas sumber (Daliman, 2012:66). Setelah melalui kritik sumber, maka tahapan selanjutnya adalah interpretasi, menurut Kuntowijoyo (2005:90) interpretasi terbagi menjadi dua bagian yaitu analisis dan sintesis. Analisis adalah upaya menemukan fakta dari sumber-sumber yang telah terkumpul, Sedangkan sintesis adalah menyatukan data-data yang ada untuk menemukan fakta tentang suatu peristiwa sejarah. Tahapan akhir adalah historiografi atau penulisan kembali dengan menggunakan model deskriptif-analitis. Penulisan deskriptif digunakan untuk menggambarkan bentuk

kelembagaan atau struktur kehidupan masyarakat dalam periode tertentu. Sementara analitik mengutamakan menampilkan analisis suatu masalah dengan menghadirkan bukti sejarah yang berhasil dihimpun dan menampilkannya melalui argumen rasional (Daliman, 2012:66).

II. ORGANISASI MILITER SEBELUM KEMERDEKAAN

Pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, dibentuk satuan tentara bernama *Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger* (KNIL) atau Tentara Kerajaan di Hindia-Belanda. Tujuan awal pembentukan KNIL adalah sebagai pasukan penjaga keamanan dalam negeri. Anggotanya terdiri atas serdadu dari kalangan bumiputra, sedikit perwira bumiputra dan perwira berkebangsaan Belanda. Calon perwira KNIL dididik oleh *Koninklijk Militaire Academie* (KMA) atau Akademi Militer Kerajaan di Breda, Belanda. Perang Dunia II di teater Eropa membuat Belanda diduduki pasukan Jerman, sehingga pemerintah kolonial menambah pusat pelatihan untuk calon perwira cadangan KNIL dari kalangan bumiputra. Pusat pelatihan ini bernama *Corps Opleiding Reserve Officieren* (CORO) dan berkedudukan di Bandung. Pembentukan sekolah perwira cadangan ditujukan untuk menghadapi kemungkinan serangan Jepang yang mendeklarasikan Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik (Adam, dalam Nordholt, Purwanto dan Saptari, 2013:113-114).

Kekuatan Jepang pada fase awal Perang Pasifik mencengangkan pihak Sekutu. Pada tanggal 8 Desember 1941 armada Jepang dengan mengerahkan kekuatan udaranya membombardir Pearl Harbor, pangkalan Armada Pasifik Amerika Serikat yang terletak di Hawaii. Tidak berselang lama, tanggal 11 Januari 1942 tentara Jepang mendarat di Tarakan yang kaya minyak. Serangan yang gencar dari pihak Jepang membuat Tarakan dapat direbut pada 12 Januari 1942. Tanggal 24 Januari, Balikpapan yang juga memiliki sumber minyak jatuh ke tangan Jepang. Berturut-turut Pontianak direbut pada 29 Januari 1942, Samarinda pada 3 Februari 1942, Kotabangun pada 5 Februari 1942, Samarinda pada 6 Februari 1942, dan Banjarmasin jatuh pada 10 Februari 1942 (Poesponegoro dan Notosusanto, 1993:1).

Tanggal 14 Februari 1942 Jepang menerjunkan pasukan lintas udara di Palembang dan berhasil menguasai Palembang dan sekitarnya pada 16 Februari 1942. Selanjutnya ofensif Jepang terfokus pada Pulau Jawa, kekuatan yang dikerahkan meliputi Divisi ke-2 di Jawa Barat dan Divisi ke-48 di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kekuatan Jepang bertambah dengan bergabungnya Divisi ke-38 dan Brigade Sakaguchi. Tanggal 1 Maret Jepang berhasil mendarat di Teluk Banten, Eretan Wetan (Jawa Barat), dan Kragan di Jawa Tengah (Poesponegoro dan Notosusanto, 1993:2-3).

Pihak pemerintah Hindia-Belanda bukannya tinggal diam menghadapi ofensif Jepang. Kekuatan KNIL, termasuk taruna KMA dan CORO dan dibantu pasukan Inggris dan Amerika Serikat dikerahkan untuk membendung ofensif Jepang. Keterlibatan Inggris dan Amerika Serikat terkait dengan komando gabungan ABDACOM (*American British Dutch Australian Command*) yang dibentuk untuk mengantisipasi penyerbuan Jepang. Namun upaya pemerintah Hindia-Belanda tidak memberikan kerugian yang berarti di pihak Jepang. Tanggal 5 Maret 1942 pemerintah Hindia-Belanda mengumumkan bahwa Batavia sebagai “kota terbuka”. Kota ini memang tidak lagi menjadi pusat pemerintahan sejak akhir Februari 1942, karena Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Stakenborgh Stachouwer bersama para pejabat teras lain mengungsi ke Bandung.

Gelombang serbuan Jepang akhirnya mencapai pangkalan udara Kalijati, Subang pada 1 Maret 1942. Fasilitas ini hanya berjarak 40 km dari Bandung. KNIL berusaha merebut kembali Kalijati, namun gagal dan justru Jepang merangsek maju hingga berhasil menduduki Lembang pada tanggal 7 Maret 1942. Situasi yang tidak menguntungkan memaksa KNIL

mengajukan permintaan penyerahan lokal pada Jepang. Namun Panglima Tentara ke-16 Jepang, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura menuntut agar seluruh kekuatan Sekutu di Jawa dan bagian Hindia-Belanda lain menyerah total disertai ancaman bahwa Kota Bandung akan dibombardir dari udara. Letjen Imamura juga menuntut agar selambat-lambatnya tanggal 8 Maret 1942 Gubernur Jenderal Hindia-Belanda datang ke Kalijati untuk mengadakan perundingan. Akhirnya Gubernur Jenderal Tjarda van Stakenborgh Stachouwer didampingi Panglima KNIL Letnan Jenderal Hein Ter Poorten beserta rombongan datang ke Kalijati, tanggal 8 Maret 1942. Perundingan akhirnya berakhir dengan kapitulasi (penyerahan tanpa syarat) Hindia-Belanda kepada Jepang (Poesponegoro dan Nugroho, 1993:4-6).

Pemerintahan militer Jepang kemudian membentuk sejumlah organisasi militer maupun semi militer sebagai upaya membentuk kekuatan cadangan untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Organisasi militer yang dibentuk Jepang adalah *Heiho* dan Pembela Tanah Air (PETA). *Heiho* dibentuk sebagai pasukan pembantu bagi militer Jepang, oleh karena itu anggota *Heiho* ditempatkan langsung di bawah komando Angkatan Darat atau Angkatan Laut Jepang. *Heiho* dibentuk untuk berperang, karena itu prajurit *Heiho* memiliki keterampilan mengoperasikan persenjataan berat seperti penangkis serangan udara, tank hingga artileri. *Heiho* tidak mendapatkan jenjang pangkat perwira (Poesponegoro dan Nugroho, 1993:33).

Adapun PETA dibentuk dengan fungsi pertahanan wilayah jika sewaktu-waktu terjadi serangan Sekutu. Fungsi pertahanan wilayah inilah yang membuat prajurit PETA akan ditempatkan di wilayah asalnya. Di samping itu, PETA dipersiapkan sebagai tulang punggung kemerdekaan Indonesia di kemudian hari (Sapto, 2012:168). Uniknya, pembentukan PETA dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah merupakan usul dari pihak Indonesia. Orang yang terpilih untuk mengajukan usul pembentukan PETA adalah Gatot Mangkoeprodjo, yang kemudian “mengajukan permohonan” kepada *Gunseikan* (kepala pemerintahan militer) tentang pembentukan tentara beranggotakan orang Indonesia. “Permohonan” Gatot Mangkoeprodjo disetujui dan dikeluarkan peraturan *Osamu Serei* No. 44 tertanggal 3 Oktober 1943. *Osamu Serei* No. 44 menjadi dasar formal pembentukan Pembela Tanah Air (Poesponegoro dan Nugroho, 1993:34). Di Sumatera, dibentuk pula organisasi militer serupa PETA yang bernama *Giyûgun*.

Calon anggota PETA direkrut dari masyarakat dan latar belakang calon akan menentukan kepangkatannya kelak. Pendidikan calon perwira PETA dilaksanakan di Bogor oleh *Jawa Bôei Giyûgun Kanbu Rensetai* (Korps Latihan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa). Nama lembaga ini kemudian berganti menjadi *Jawa Bôei Giyûgun Kanbu Kyôkurai* (Korps Pendidikan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa). Setelah lulus, prajurit PETA disebar di *daidan* (batalion) yang berada di wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Jumlah keseluruhan adalah 66 *daidan* (Poesponegoro dan Nugroho, 1993:36).

Para calon kadet PETA berasal dari berbagai kalangan, latar belakang etnis maupun pekerjaan. Rekrutmen PETA memang menarik perhatian besar dari kalangan pemuda, di antara calon angkatan pertama terdapat seorang mantri malaria yang berdomisili di Jember bernama Mochammad Sroedji. Pemuda kelahiran Bangkalan, 15 Februari 1915 tertarik dengan rekrutmen PETA yang dibacanya di harian *Djawa Baroe* (Widuatie, 2016:26). Kecakapan dan latar belakang pekerjaannya membawa Sroedji pada pendidikan calon *chûdanchô* (komandan kompi). Sroedji tergabung dalam Kompi I *Chûdanchô*, dengan instruktur perwira Jepang, Letnan Satu Nomura Shohichi (Bagan Struktur Kepegawaian Karesidenan Besuki Batalion 1 Kencong Jember 1943). Pada 8 Desember 1943 Sroedji dan para kadet angkatan pertama dinyatakan lulus dan dilantik di Lapangan Ikada, Jakarta (Poesponegoro dan Nugroho, 1993:36). *Chûdanchô* Sroedji mendapat tugas di *Daidan* II Besuki yang membawahi wilayah Jember dan Banyuwangi. Bertindak sebagai *Daidanchô*

(komandan *Daidan*/batalion) II Besuki saat itu adalah M. Soewito Kartosoedarmo.

III. TENTARA NASIONAL DAN ANCAMAN KEDAULATAN

Pada tanggal 14 Agustus 1945, Kekaisaran Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dengan ditandai upacara kapitulasi di atas USS *Missouri*, kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di Tokyo. Informasi ini berusaha ditutup-tutupi oleh tentara Jepang di Indonesia, namun Sutan Sjahrir dapat mengetahuinya melalui radio rahasia. Meski telah menyerah, namun tentara Jepang di Indonesia masih bersenjata, hanya saja status kekuasaan menjadi kosong (*vacuum of power*). Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya melalui upacara Proklamasi Kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta.

Kemerdekaan yang telah diproklamasikan tidak langsung dibarengi dengan adanya kekuatan pertahanan negara, dalam hal ini tentara nasional. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat, PETA dibubarkan dan dilucuti Jepang. Prajurit PETA kemudian disuruh kembali ke daerah masing-masing. Di sisi lain, pemerintah yang mulai dibentuk tanggal 18 Agustus 1945 belum juga mengumumkan pembentukan tentara nasional.

Tanggal 19 Agustus 1945, para pemuda mengundang Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk menghadiri rapat di Jalan Prapatan 10. Rapat dipimpin Adam Malik yang kemudian membacakan dekrit mengenai lahirnya tentara Republik Indonesia dari bekas *Heiho* dan PETA. Presiden dan Wakil Presiden menyetujui, namun belum dapat memutuskan saat itu juga. Akhirnya tanggal 22 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, diputuskan pembentukan tiga lembaga negara, meliputi Komite Nasional, Partai Nasional dan Badan Keamanan Rakyat (Poesponegoro dan Notosusanto, 1993:100). Badan Keamanan Rakyat yang disingkat BKR dalam pembentukannya disebutkan berfungsi “*memelihara keamanan bersama-sama dengan rakyat dan badan-badan negara yang bersangkutan*” (Sundhaussen, 1986:11).

Keanggotaan BKR terbuka untuk para pemuda Indonesia, namun pihak yang memiliki antusiasme tinggi untuk bergabung adalah para mantan PETA dan beberapa mantan KNIL. Perwakilan mantan PETA dalam BKR dapat diambil contoh yaitu Soedirman (mantan *daidanchô* di Kroya, Banyumas), sedangkan dari mantan KNIL misalnya Oerip Soemohardjo (mantan Mayor KNIL), Suryadi Suryadharma (penerbang KNIL) dan Abdul Haris Nasution (alumni CORO). Ada pula mantan KNIL yang kemudian secara diam-diam bergabung dalam PETA, misalnya Gatot Soebroto, Achmad Yani, dan Soeharto. Keanggotaan BKR lain diisi oleh pemuda-pemuda dari barisan perjuangan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal kemiliteran. Pemuda di Jakarta membentuk BKR pusat yang dipimpin mantan *daidanchô* Mr. Kasman Singodimedjo. Namun karena Mr. Kasman ditarik dalam kepengurusan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) maka sebagai pengganti ditunjuk Kaprawi sebagai Ketua Umum, Sitalaksana (Ketua I), Latief Hendraningrat (Ketua II) dan dibantu Arifin Abdurrachman, Mahmud dan Zulkifli Lubis (Poesponegoro dan Notosusanto, 1993:107). Pembentukan BKR di daerah juga dilakukan oleh para pemuda, khususnya mantan anggota PETA, termasuk di Jember, Jawa Timur. Eks *Daidan* II PETA direorganisasi sebagai Resimen II/BKR. Salah satu mantan perwira PETA yang menggabungkan diri dalam Resimen II/BKR adalah Mochammad Sroedji, eks *chûdanchô*. Pangkat yang diterima Mochammad Sroedji adalah mayor.

Meski secara formal BKR telah terbentuk, namun lembaga ini tidak memiliki persenjataan sebagaimana lazimnya militer. Persenjataan PETA telah dilucuti sebelum kemerdekaan, dan tindakan yang kemudian dilakukan untuk memperoleh senjata adalah

merebut persenjataan dari sejumlah arsenal (gudang senjata) milik Jepang. Perebutan senjata terjadi antara lain di Surabaya pada bulan September 1945, dimana gudang senjata Don Bosco direbut pemuda dan markas angkatan laut di Ujung juga diambil alih. Sementara di Yogyakarta, BKR bersama Polisi Istimewa (embrio satuan Brigade Mobil) merebut fasilitas *Otsuka Butai* pada tanggal 7 Oktober 1945. Di Bandung, para pemuda merebut pangkalan udara Andir (kini Pangkalan Udara Husein Sastranegara) dan pabrik senjata bekas ACW atau *Artillerie Constructie Winkel* (sekarang fasilitas milik PT Pindad). Tidak jarang perebutan senjata Jepang oleh pemuda berakhir dengan pertempuran, misalnya Pertempuran Lima Hari di Semarang (Poesponegoro dan Nugroho, 1993:104). Perebutan juga terjadi di luar Jawa, seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

Sebagai suatu lembaga tentara, dibentuk struktur kepemimpinan yang berada di bawah Kementerian Keamanan Rakyat pada 20 Oktober 1945. Susunan pusat TKR meliputi:

- Menteri Keamanan Rakyat *ad interim* : Suljoadikusumo (kemudian digantikan Moestopo)
- Pemimpin Tertinggi TKR : Soeprijadi
- Kepala Staf Umum : Oerip Soemohardjo (Rahardjo dan Suko, 2010:540)

Pada bulan November 1945 diadakan pemilihan Panglima Besar, hal ini diantaranya disebabkan ketidakmunculan Soeprijadi serta kebutuhan mendesak untuk penyempurnaan TKR. Hasil pemilihan memunculkan nama Soedirman sebagai Panglima Besar TKR dan Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf Umum. Struktur pusat TKR yang telah terbentuk kemudian diikuti pembentukan komando-komando di daerah-daerah. Susunan komando TKR di daerah terdiri atas komandemen, divisi, batalion, kompi, dan peleton. Perubahan BKR menjadi TKR diikuti dengan perubahan struktur di daerah-daerah. Resimen II/BKR di Jember berubah menjadi Resimen IV/TKR Divisi VIII.

IV. PERJUANGAN DI FRONT JAWA TIMUR

Pembentukan TKR di tingkat daerah disambut baik oleh pemuda-pemuda di Jawa Timur, khususnya mereka yang merupakan mantan PETA. Sundhaussen mencatat hal yang spesifik dari para perwira dari Jawa Timur, yaitu mereka memiliki orientasi santri yang kuat. Hal tersebut dapat disebabkan karena di antara mereka terdapat perwira-perwira yang berasal dari Madura dengan Islam yang kuat (Sundhaussen, 1988:23). Para mantan perwira PETA di Jawa Timur kemudian banyak yang menjadi komandan satuan-satuan TKR.

Pembentukan TKR sebagai angkatan bersenjata Republik Indonesia di awal kemerdekaan segera mendapat ujian. Tanggal 25 Oktober 1945 di Surabaya merapat pasukan Inggris dari Brigade 49 yang dikomandani Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby yang membawa tugas untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan Sekutu. Namun pasukan Inggris juga memaksa agar rakyat Indonesia dan TKR agar menyerahkan senjata mereka juga. Ketegangan segera memuncak dan dengan cepat berubah menjadi pertempuran terbuka. Dalam pertempuran di Jembatan Merah, Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby tewas. Peristiwa ini memantik reaksi keras dari pihak Inggris. Mayor Jenderal E.C. Mansergh yang menggantikan Mallaby mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata di tempat-tempat yang ditentukan Inggris. Mereka diwajibkan mengibarkan bendera putih dan mengangkat tangan sebagai tanda menyerah. Batas ultimatum adalah tanggal 10 November 1945 pukul 06.00 pagi. Apabila ultimatum tidak dipatuhi maka Surabaya akan digempur dari darat, laut, maupun udara (Poesponegoro dan Nugroho, 1993:110-116).

TKR merespon ultimatum Inggris dengan mempersiapkan kekuatan. Kolonel Sungkono

bertindak sebagai komandan pertahanan Surabaya. Dukungan kekuatan datang dari satuan-satuan di Jawa Timur, di antaranya Batalion Sroedji yang dipimpin Letnan Kolonel Mochammad Sroedji dan berkedudukan di Jember. Batalion Sroedji ditunjuk memperkuat Front Pertahanan Tengah di Sidoarjo (Widuatie, 2016:39).

V. AGRESI MILITER BELANDAI

Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, Sekutu sebagai pihak pemenang bermaksud “memulihkan keadaan” di wilayah bekas jajahan. Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 masih dianggap sebagai jajahan Belanda, dengan demikian menurut sudut pandang Sekutu wilayah Indonesia akan dikembalikan pada Belanda. Pasukan Sekutu yang terdiri dari pasukan Inggris mendarat di Jakarta, Semarang, Surabaya dan Medan. Kedatangan Inggris dengan segera memicu pertempuran dengan tentara dan laskar-laskar Indonesia. Sesuai niat awal untuk mengembalikan wilayah Indonesia ke bawah penjajahan Belanda, maka kedatangan Inggris juga sekaligus membawa NICA (*Nederland Indie Civil Administration*). Kehadiran NICA adalah untuk menegakkan kembali negeri jajahan yang disebut sebagai Hindia-Belanda, dan salah satu kegiatan NICA yang provokatif adalah mempersenjatai mantan anggota KNIL yang dibebaskan dari interniran.

Inggris berusaha memberi jalan tengah atas pertikaian antara NICA dan Indonesia dengan mengirim duta istimewa, Sir Archibald Clark Kerr. Inggris mengupayakan perundingan antara Indonesia dan Belanda, dimana pihak Belanda diwakili mantan Letnan Gubernur Hindia-Belanda Hubertus Johannes van Mook. Perundingan dimulai tanggal 10 Februari 1946. Pihak Indonesia yang diwakili kabinet parlementer pimpinan Sutan Sjahrir belum memberikan usul balasan. Organisasi di luar kabinet tidak menyetujui strategi diplomasi Sjahrir. Sidang KNIP di Solo tanggal 28 Februari 2 Maret 1948 menghasilkan suara mayoritas menentang kebijaksanaan perundingan yang diambil Sjahrir. Pihak lain yang menentang perundingan dengan pihak asing adalah Persatuan Perjuangan (PP) yang menuntut “merdeka seratus persen”. Kuatnya oposisi terhadap kabinet akhirnya membuat Perdana Menteri Sutan Sjahrir mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Ternyata Presiden kembali menunjuk Sutan Sjahrir sebagai formatur kabinet kedua, yang dikenal sebagai Kabinet Sjahrir II (Poesponegoro dan Nugroho, 1993:121-125).

Kabinet Sjahrir II memutuskan melanjutkan strategi diplomasi dengan pihak Belanda, sekalipun suara-suara penolakan semakin keras. Akhirnya pihak Indonesia dan Belanda menyepakati perundingan di Linggarjati yang hasilnya diteken oleh perwakilan kedua pihak sebagai Perjanjian Linggarjati. Seperti halnya perundingan-perundingan sebelumnya, hasil Perjanjian Linggarjati tidak memuaskan banyak kalangan di Indonesia. Sementara Belanda memutuskan tidak menunggu terlalu lama, dan akhirnya menggelar agresi militer ke wilayah Republik Indonesia. Karena Perjanjian Linggarjati telah menjadi sorotan internasional, maka Belanda menyatakan bahwa pengerahan pasukannya sebagai *politieele actie* (aksi polisionil).

Agresi militer Belanda diawali tanggal 21 Juli 1947 dengan sandi *Operatie Product*. Secara sistematis dengan dukungan persenjataan dan strategi mutakhir pasukan Belanda dapat mendesak pasukan TNI. Di Jawa Timur, Belanda mengerahkan pasukan untuk melakukan operasi pendaratan amfibi di Pantai Pasir Putih, Situbondo. Marinir Belanda kemudian menyusup masuk wilayah pertahanan Republik di Situbondo, Bondowoso, Jember hingga Lumajang (Mertowijoyo, 2015:51-53).

Kekuatan yang tidak seimbang membuat strategi perang ditinjau ulang. TNI membentuk *Commando Offensive Guerilla* (COG) sebagai upaya menandingi kekuatan Belanda. Pada

tiap-tiap daerah dibentuk COG berdasarkan satuan tempur yang beroperasi di wilayah tersebut. Berdasarkan strategi baru ini, Resimen 39/Menak Koncar yang dipimpin Letnan Kolonel Mochammad Sroedji berubah menjadi COG III dengan wilayah pertahanan Karesidenan Besuki, teristimewa meliputi Jember Selatan, Klakah, Lumajang, dan Probolinggo. Perubahan tersebut diikuti perubahan satuan di tingkat batalion, Batalion Macan Putih (Kapten Abdul Rifa'i) bersama dua kompi dari Batalion Garuda Putih (Kapten Sjafioedin) dilebur menjadi Batalion Gerilya X. Batalion Andjing Laut (Mayor E.J. Magenda) dilebur dengan Batalion Semut Merah (Mayor Rasadi) menjadi Batalion Gerilya IX dengan komandan Mayor E.J. Magenda. Sedangkan Batalion Alap-Alap dan Batalion Garuda Putih (minus dua kompi) dilebur menjadi Batalion Gerilya VIII dengan komandan Mayor Sjafioedin. (Mertowijoyo, 2015:67).

Situasi perjuangan yang menuntut sinergi antara TNI dengan rakyat melahirkan badan-badan pertahanan rakyat yang dibentuk di daerah-daerah atas inisiatif pihak TNI dan pemerintah sipil. Letkol Sroedji sebagai Komandan COG III mengadakan kerjasama dengan pejabat sipil pemerintah Lumajang, Sastrodikoro membentuk *Volks Defensie Kabupaten Lumajang* (VDKL) sebagai pemerintahan darurat. Struktur VDKL yaitu Sastrodikoro sebagai ketua/komandan, Sukardi sebagai wakil dan Letkol Sroedji sebagai penasihat, pusat pemerintahan darurat ditetapkan di Pronojiwo (Widuatie: 2016, 47-48). Pembentukan VDKL adalah untuk menegaskan kedaulatan Republik Indonesia secara *de facto* di daerah.

Agresi militer Belanda terhadap wilayah Republik menuai protes dunia internasional. Tanggal 30 Juli 1947 pemerintah India dan Australia secara resmi mengajukan permintaan kepada Dewan Keamanan PBB agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar acara Dewan Keamanan. Permintaan kedua negara disetujui dan pada 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan perintah penghentian permusuhan II (Poesponegoro dan Nugroho, 1993:139-140).

VI. AGRESI MILITER BELANDA II

Situasi politik di Indonesia pasca Agresi Militer Belanda I mengalami perubahan. Kabinet Sjahrir II telah digantikan oleh Kabinet Amir Sjarifuddin. Pemerintah Indonesia kembali menempuh jalur perundingan dengan Belanda dengan difasilitasi oleh Komisi Tiga Negara (KTN). Perundingan dilakukan di atas kapal perang Amerika Serikat, USS *Renville* mulai tanggal 8 Desember 1947 dan hasilnya dikenal sebagai Perjanjian Renville. Salah satu isi perjanjian Renville adalah bahwa pasukan TNI harus meninggalkan basis pertahanan mereka menuju daerah Republik Indonesia yang diakui Belanda. Konsekuensi bagi TNI adalah mereka harus melakukan *long march* atau “hijrah” dari basis pertahanan menuju wilayah Republik. Pasukan TNI di Jawa Timur, termasuk satuan yang dipimpin Letkol Sroedji harus melakukan hijrah menuju Pakisaji, Sumberpucung, Dampit, Kesamben, Wlingi, Blitar (Kodim 0824, 1972:1).

Pasca Perjanjian Renville, namun sebelum hasil perjanjian dilakukan, Kabinet Amir Sjarifuddin jatuh dan digantikan Kabinet Hatta. Salah satu program yang dilakukan terhadap TNI adalah Rekonstruksi dan Rasionalisasi, biasa dikenal dengan ReRa. Kebijakan ini diambil untuk menghasilkan angkatan bersenjata yang efisien, karena sampai dengan 1948 terjadi ketimpangan antara jumlah personel yang terlalu besar dan kurangnya persenjataan. Selain itu program ReRa juga dilakukan untuk mengatasi kekacauan garis komando dan organisasi TNI akibat politisasi yang terjadi pada masa Kabinet Amir Sjarifuddin.

Berdasarkan ReRa, Letkol Mochammad Sroedji dimutasi dari jabatan sebagai Komandan Resimen 39/Menak Koncar menjadi Komandan Resimen 40/Damarwulan. Sesuai

dengan salah satu program ReRa yaitu peleburan badan perjuangan ke dalam TNI, Resimen 40 disiapkan sebagai embrio Brigade III. Tugas Letkol Sroedji juga mencakup koordinasi lapangan untuk anggota yang hijrah di tempat baru. Namun sebelum program ReRa berjalan sesuai harapan, terjadi Pemberontakan PKI Madiun (18 September 1948) yang dipimpin Musso dan bekas perdana menteri Amir Sjarifuddin. Letkol Sroedji yang berada di Blitar mendapat tugas sebagai Kepala Staf Gabungan Angkatan Perang (SGAP). Kekuatan SGAP adalah semua unsur TNI ditambah Kepolisian dan TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar). Tugas SGAP adalah memadamkan pemberontakan PKI Madiun, khususnya di wilayah Blitar dan sekitarnya (Kodim 0824, 1972:2).

Pada akhir Oktober 1948, pasca operasi penumpasan PKI Madiun, Letkol Sroedji mendapat tugas baru sebagai kelanjutan program ReRa. Sesuai Keputusan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia No. A/582/48 tanggal 25 Oktober 1948 Resimen 40/Damarwulan berubah menjadi Brigade Mobile Damarwulan, dengan Letkol Sroedji sebagai komandan. Tanggal 17 Desember 1948, Brigade Mobile Damarwulan kembali berubah menjadi Brigade III/Damarwulan (Kodim 0824, 1972:3).

Sementara itu pemimpin TNI mulai melihat gelagat kurang baik dari Belanda. Tanda-tanda yang dirasakan antara lain Belanda selalu berusaha mengulur-ulur waktu realisasi hasil Perjanjian Renville. Laporan yang masuk juga menyatakan bahwa Belanda mulai menempatkan pasukannya di dekat garis demarkasi/Garis van Mook (Poesponegoro dan Notosusanto, 1993:158). Berkaca pada pengalaman 1947, pimpinan TNI mulai menggodok rencana pertahanan. Konsep yang dirancang adalah Pertahanan Rakyat Semesta. Pada bulan November 1948, Panglima Besar Angkatan Perang mengeluarkan Perintah Siasat Nomor 1.

Kewaspadaan pimpinan TNI terhadap niat Belanda untuk kembali menyerang akhirnya terbukti pada Desember 1948. Diawali pidato Komisaris Tinggi Belanda, Dr. Louis Beel yang menyatakan bahwa terhitung sejak 19 Desember 1948 pukul 00.00 Belanda tidak lagi terikat dengan Perjanjian Renville. Di Bandung dan Semarang, pasukan komando Belanda, *Korps Speciale Troepen* (KST) bersiap-siap. Mereka mendapat misi merebut dan menduduki ibukota RI di Yogyakarta melalui sebuah “aksi polisionil” dengan sandi *Operatie Kraai* (Operasi Gagak). Panglima Tentara Belanda Letnan Jenderal Simon Hendrik Spoor turun langsung dan memberi tugas pasukan komandot, yaitu “*membebaskan Yogyakarta dari tangan ekstremis serta menangkap Sukarno bersama pengikutnya*” (Pour, 2010:1).

Pada hari Minggu, 19 Desember 1948 pagi, pesawat-pesawat pemburu Belanda P-51 *Mustang* dan P-40 *Kittyhawk* disertai beberapa *bomber* B-25 *Mitchell* melakukan serangan terhadap Yogyakarta.

Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta beserta sejumlah menteri sedang mengadakan rapat kabinet di Istana Kepresidenan Gedung Agung pada 19 Desember pagi. Panglima Besar TNI Letnan Jenderal Soedirman yang menunggu di luar ruang rapat akhirnya memutuskan segera bergabung dengan pasukannya. Hasil rapat ternyata memutuskan bahwa unsur pemerintah sipil akan tetap tinggal di kota, dan Mr. Sjafroeddin Prawiranegara (Menteri Kemakmuran RI) yang sedang berada di Bukittinggi ditunjuk untuk membentuk pemerintahan darurat jika pemimpin RI ditangkap Belanda (Sundhaussen, 1986:74).

Siang harinya, pasukan KST yang dipimpin Letkol W.C.A. van Beek tiba di Gedung Agung. Sempat terlibat kontak senjata, Letkol van Beek kemudian menemui Soekarno dan menyatakan bahwa Soekarno berada dalam status sebagai tahanan (Pour, 2010:108).

VII. PERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN AKSI WINGATE

Sesaat setelah serangan pertama Belanda, Panglima Besar Letnan Jenderal Soedirman mengeluarkan Perintah Kilat Nomor 1, sebagai tindak lanjut dari Perintah Siasat Nomor 1 yang telah diumumkan pada November 1948.

Perintah Panglima Besar Soedirman segera disusul dengan Perang Gerilya Semesta. Panglima Besar memimpin langsung komando tempur dengan bergerilya. Di Jawa Timur, konsentrasi sebagian pasukan TNI berada di Kediri. Pada tanggal 17 Desember 1948, dua hari sebelum Belanda menyerang Yogyakarta diadakan apel pasukan setelah operasi penumpasan PKI Madiun. Apel dilaksanakan di Lapangan Kuwak, Kediri dan dihadiri Panglima Tentara dan Teritorium Jawa Kolonel Abdul Haris Nasution, Panglima Divisi I Jawa Timur Kolonel Soengkono beserta komandan satuan-satuan TNI di Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut Kolonel A.H. Nasution mengukuhkan Brigade III/Damarwulan dan Letnan Kolonel Mochammad Sroedji sebagai Komandan Brigade III/Damarwulan Divisi I Jawa Timur (Kodim 0824, 1972: 3).

Berdasarkan Perintah Kilat No. 1 tanggal 19 Desember 1948, Komandan Divisi I Jawa Timur Kolonel Soengkono segera meneruskan pada jajaran di bawahnya tentang serangan Belanda, dan perintah untuk melaksanakan "*wingate action*". Sesuai dengan perintah tersebut, pasukan TNI sebelum melaksanakan *wingate*, terlebih dahulu melakukan bumi hangus terhadap kota-kota yang diduduki agar tidak dapat digunakan oleh Belanda.

Brigade III/Damarwulan yang dipimpin langsung Letnan Kolonel Mochammad Sroedji segera bersiap untuk kembali ke basis Brigade III di wilayah Besuki. Jarak yang harus ditempuh Brigade III tidak kurang dari 500 km melintasi hutan dan pegunungan di sepanjang rute Kediri Besuki. Tantangan yang harus dihadapi Brigade III cukup banyak. Selain medan yang sulit, kolone Brigade III bertambah dengan ikut sertanya keluarga prajurit. Hal ini menambah jumlah rombongan secara signifikan dan berdampak pada kebutuhan logistik yang meningkat. Tidak semua personel membawa serta keluarganya, Letkol Sroedji dan Residen Militer Letkol dr. Soebandi meninggalkan keluarga mereka di Blitar. Faktor yang menambah berat perjalanan *wingate* Brigade III adalah meningkatnya intensitas serangan dari pihak Belanda. Patroli Belanda semakin giat beroperasi dan juga menyebar mata-mata agar dapat terus memonitor gerakan Brigade III (Nasution, 1979:175).

Kekuatan Brigade III pada saat Agresi Militer II terdiri atas tiga batalion, yaitu Batalion 25 dengan komandan Mayor Syafiudin, Batalion 26 dengan komandan Mayor Ernst Julius Magenda, Batalion 27 dengan komandan Kapten Soedarmin, dan Batalion Depot dibawah komando Mayor Darsan Iroe. Ditambah keluarga yang ikut ber-*wingate*, jumlah kolone Brigade III meningkat dan memperlambat pergerakan mereka. Brigade III terlibat kontak dengan Belanda di Lodoyo, dengan korban dua prajurit dan kehilangan sejumlah amunisi (Nasution, 1991:305).

Rencana awal rute *wingate* Brigade III adalah melalui Lodoyo Binangun Bantur Sumber Manjing dan menerobos menuju Tempursari Gondoruso untuk mencapai Lumajang bagian selatan. Dislokasi batalion mendekati garis demarkasi tersusun atas Batalion 26 berada paling depan, diikuti Batalion 25, Staf Brigade III, Batalion 27 dan paling belakang adalah Batalion Depot. Namun seiring dinamika lapangan, terutama meningkatnya kontak dengan Belanda membuat gerakan menjadi tidak sesuai rencana awal (Nasution, 1991:306).

Gerakan Brigade III sempat bersinggungan dengan Belanda di Binangun dan terjadi kontak sehingga satuan lain harus menghindari Binangun. Batalion 26 bergerak menuju Tempursari, sedangkan Batalion 25 melewati sebelah utara Kepanjen. Kompi Winoto sempat melakukan siasat bumi hangus di sekitar Kota Blitar sebelum bergerak menyusul kolone

induk. Dalam melaksanakan *wingate action*, Brigade III menghadapi kesulitan terbesar berupa logistik. Brigade III tidak memiliki persiapan perbekalan untuk perjalanan, begitu pula persiapan intelijen bersifat global. Saat mencapai Blitar bagian selatan kendala logistik terutama makanan mulai terasa. Wilayah Blitar selatan tergolong “minus” disamping kondisi yang tandus, dan ditambah sisa-sisa kemelut akibat Pemberontakan PKI Madiun 1948 yang menjalar hingga wilayah ini. Pasukan Brigade III dan keluarga yang ikut ber-*wingate*, termasuk anak-anak terpaksa bertahan hidup dengan mengonsumsi daun-daunan (Nasution, 1991:306; Nasution, 1979:188).

Pada tanggal 25 Desember 1948, Brigade III memasuki wilayah Semeru Selatan. Staf Brigade III tiba di Malang Selatan yang dikuasai KNIL. Batalion 26 bergerak menuju Sumbertangkil melalui daerah minus dan menghadapi kesulitan logistik. Batalion 27 melewati bagian selatan Donomulyo. Batalion 25 mengikuti kolone Staf Brigade III. Adapun pasukan lainnya masih berada di wilayah Blitar. Akhir Desember 1948, kolone Staf Brigade III tiba di Sumbertempur, Batalion 25 tiba di Brintik, Batalion 26 tiba di Sumbertangkil disusul Batalion 27. Kesulitan di medan Semeru Selatan adalah ruang gerak yang terbatas di hutan-hutan, di samping itu Lumajang sedang dilanda paceklik. (Nasution, 1991:307).

Batalion 26 yang telah tiba di Tempursari menugaskan dua kompi untuk menyerang kedudukan Belanda. Siasat ini diperlukan karena Tempursari harus direbut untuk membuka jalan. Batalion 27 bergabung dan pada fajar 1 Januari 1949, serbuan terhadap Tempursari dimulai. Kompi Suwardi dari Batalion 27 bertindak sebagai pembuka serangan pada pukul 04.00 pagi. Pertempuran berlangsung selama beberapa jam, dan akhirnya Tempursari berhasil direbut. Pasukan KNIL mundur ke Pasirian, di pihak Brigade III gugur dua prajurit dan satu luka parah. Pasukan KNIL memanggil bantuan udara, dan sekitar pukul 09.00 terjadi serangan udara terhadap Tempursari oleh empat pesawat pemburu P-51 *Mustang* dan dua pembom B-25 *Mitchell*. Tempursari diserang dengan senapan mesin dan dibombardir dengan 100 bom yang dijatuhkan pada serangan balasan tersebut. Serangan diulangi hingga Tempursari dapat disebut rata dengan tanah (Nasution, 1991:307).

Brigade III yang berhasil menghindari serangan udara Belanda melanjutkan perjalanan menuju Lumajang via Ampelgading. Perjalanan tidak menemui hambatan dari Belanda karena mereka fokus memusatkan kekuatan di Pasirian, yang diduga akan dilalui kolone Brigade III. Kondisi ini memungkinkan Brigade III untuk dapat bergerak lebih jauh, karena tidak ada rencana untuk menyerang Pasirian. Tujuan Brigade III selanjutnya adalah Desa Penanggal, desa ini ditetapkan sebagai *rendezvous point* Brigade III sebelum memasuki Besuki. Staf Brigade III tiba paling awal di Penanggal, sementara Batalion 25 masih berada di hutan Semeru Selatan. Batalion 26 dan Batalion 27 masih beristirahat di Sumbertangkil. Komunikasi antara Staf Brigade III dan batalion-batalion dilakukan dengan bantuan kurir, sementara untuk berkomunikasi dengan Divisi I digunakan radio. Pada tanggal 9 Januari 1949 Belanda menarik pasukannya dari Penanggal untuk memperkuat Pasirian. Pasukan pelopor Batalion 25, Batalion 26, Batalion 27, dan Batalion Depot berhasil merebut Penanggal dan melakukan konsolidasi kekuatan. Komandan Brigade III, Letkol Mochammad Sroedji mengatur rencana perjalanan lebih lanjut. Suatu keuntungan bagi Brigade III adalah bahwa keadaan rakyat Penanggal terbilang makmur dan setia pada Republik. Brigade III mendapatkan jamuan makan dan tambahan logistik dari rakyat (Nasution, 1991:308).

Setelah *recovery* (pemulihan) secukupnya, Brigade III melanjutkan perjalanan dan selama seminggu berikutnya situasi “landai-landai” atau tidak ada kontak dengan Belanda. Kolone Staf Brigade III menuju Desa Bodong untuk menyerang sebelah selatan Klakah. Batalion 25 tiba di Jarit (sebelah barat Pasirian) dan melakukan *raid* terhadap basis musuh di Candipuro. Dalam serangan ini Batalion 25 berhasil menewaskan 15 musuh, korban dua

orang gugur, satu hilang dan satu tertangkap serta tertinggal 8 orang. Persenjataan yang rusak atau hilang meliputi sebuah mitraliur, satu *tekidanto* (mortir), 5 unit karabin, serta satu senapan mesin jenis LMG kaliber 12,7 mm (Nasution, 1991:308).

Pasukan Batalion 27 bergerak menuju Desa Karanglodi di sebelah tenggara Lumajang. Batalion 27 terlibat kontak dengan musuh yang terdiri atas lima kendaraan angkut (*carrier*) dan sebuah truk, dimana musuh berhasil dipukul mundur namun seorang sersan dari Batalion 27 tertawan. Pasukan kemudian memasuki wilayah Jember, tepatnya di Onder Distrik Gumukmas. Sementara pasukan Batalion 26 telah berhasil memasuki Puger (Nasution, 1991:308). Baik Puger maupun Gumukmas berada di sebelah selatan/barat daya Jember.

Sesuai dengan Perintah Siasat Nomor 1, maka Letkol Mochammad Sroedji sebagai Komandan Brigade III/Damarwulan merancang strategi dan pembagian tugas. Letkol Sroedji merangkap Komandan Sub Teritorium Besuki dan langsung memimpin operasi-operasi di wilayah JemberBanyuwangi. Mayor Imam Soekarto (Wadan Brigade III) merangkap Wakil Komandan Sub Teritorium Besuki dan langsung memimpin operasi-operasi di wilayah Situbondo dan Bondowoso. Letnan Kolonel dr. Soebandi ditunjuk sebagai Residen Militer dan bergabung dengan kolone Mayor Imam Soekarto. Batalion Depot dilikuidasi dan anggotanya disebar untuk memperkuat Batalion 25, Batalion 26 dan Batalion 27. Ketiga batalion disertai tugas pertahanan rakyat (Nasution, 1991:310).

Tugas selanjutnya kepada setiap komandan adalah membentuk *wehrkreise* di wilayah masing-masing. Tugas lainnya adalah mengangkat pejabat teritorial di tiap *onder distrik* dan desa, sehingga dengan demikian secara berangsur-angsur akan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia secara *de facto*. Pada setiap *wehrkreise* nantinya batalion bersama rakyat melancarkan serangan gerilya terhadap Belanda. Target serangan adalah sasaran politik, yaitu antek-antek Belanda dan sasaran ekonomi, seperti melakukan bumi hangus terhadap perusahaan kopi dan tembakau milik asing (Nasution, 1991:310).

VIII. PERTEMPURAN KARANG KEDAWUNG

Wingate action Brigade III/Damarwulan mencapai titik kulminasi pada Pertempuran Karang Kedawung. Sebelumnya kolone Brigade III telah dipecah menjadi beberapa unit kecil untuk melaksanakan siasat *wehrkreise* dan pembentukan pemerintahan teritorial. Kondisi ini membuat kekuatan induk Brigade III menyusut. Kontak dengan Belanda yang berlangsung sengit di Gayasan (6 Februari 1948) dan Curahcabe telah menyita energi dan perlengkapan. Kolone Staf Brigade yang diperkuat beberapa kompi memutuskan untuk beristirahat di Desa Karang Kedawung, Mumbulsari. Brigade III tiba di Desa Karang Kedawung tanggal 7 Februari 1948 (Widuatie, 2016:69).

Kedatangan kolone Brigade III terdeteksi oleh intelijen Belanda yang ditindaklanjuti dengan mengerahkan kekuatan besar-besaran untuk menggempur kedudukan Brigade III. Pada tanggal 8 Februari 1949 pagi hari terdengar letusan senjata dan Letkol Sroedji memerintahkan Letnan Soebono untuk memastikan tembakan tersebut. Dari hasil pengintaian diketahui bahwa Brigade III tengah dikepung Batalion Infanteri XIII KNIL dibawah komando Letkol J.H.J. Brendgen. Pertempuran sengit tidak dapat terhindarkan, Letkol Sroedji memimpin langsung pasukannya, bersama-sama beliau terdapat Residen Militer Letkol dr. Soebandi, Abdul Syukur (pengawal pribadi komandan brigade) dan seorang pesuruh yang tidak diketahui identitasnya (Kardi, 1996:5). Pengepungan terhadap posisi Brigade III merupakan hasil pengintaian dan laporan mata-mata Belanda yang berhasil menyusup ke dalam pasukan Brigade III. Pasukan KNIL dari Batalion Infanteri XIII mengerahkan 100 prajurit dan mengepung Desa Karang Kedawung dari seluruh penjuru (Laporan Pertempuran

Kompi 4e, Batalion Infanteri XIII KNIL oleh Gerard Scheltens).

Pada saat kontak berlangsung, Letkol Sroedji dan pesuruh tertembak. Letkol Sroedji terluka dan pesuruh gugur seketika. Letkol dr. Soebandi dan Abdul Syukur segera mengevakuasi Komandan Brigade ke arah parit. Dalam upaya memberikan pertolongan, Letkol dr. Soebandi tertembak dari arah barat daya dan gugur di tempat. Abdul Syukur melaporkan gugurnya Letkol dr. Soebandi, mendengar hal tersebut Letkol Sroedji dalam kondisi terluka memutuskan meneruskan perlawanan dengan pistol dan peluru yang tersisa. Dalam tindakan tersebut Letkol Sroedji sempat menembak mati beberapa musuh, namun akhirnya Komandan Brigade III/Damarwulan Letnan Kolonel Mochammad Sroedji tertembak dan gugur di tempat (Kardi, 1996: 5). Menurut kesaksian anak buah Letkol Sroedji yang selamat atas nama Busrah dan Buyan, pada awalnya Letkol Sroedji tertembak dari arah timur akibat kurangnya perlindungan. Tembakan tersebut mengenai bagian antara bahu dan dada kiri, melihat kondisi tersebut Letkol dr. Soebandi sebagai seorang medis berusaha memberikan pertolongan pertama, namun upaya ini membuat beliau tidak terlindung dan tertembak dari arah belakang tepat di bagian kepala dan gugur seketika (wawancara R.Z Hakim dengan Busrah, 12 Desember 2014 dan Buyaman, 20 Desember 2014). Tentara Belanda yang menembak mati Letnan Kolonel Mochammad Sroedji diidentifikasi atas nama Gerard Scheltens, berasal dari Kompi 4e Detasemen Toempang, Batalion XIII KNIL. Atas keberhasilannya menembak mati Letkol Sroedji yang merupakan target buruan Belanda, Scheltens mendapat hadiah sebesar f 10.000 (Widuatie, 2016:70).

Tentara Belanda sangat berkepentingan dengan jenazah Letkol Sroedji, sehingga mereka membawa jenazah menuju markas di kota Jember. Jenazah Komandan Brigade III kemudian diseret di belakang truk militer untuk dipertontonkan kepada rakyat sebagai bentuk perang psikologis. Tanggal 9 Februari seorang tokoh masyarakat dari Kreongan bernama Kiai Dachnan menghadap komandan pasukan Belanda di Jember untuk meminta jenazah Letkol Sroedji dengan maksud dikebumikan dengan layak. Permintaan Kiai Dachnan sempat ditolak, namun akhirnya permintaan ini diluluskan setelah Kiai Dachnan mengaku sebagai keluarga almarhum. Komandan pasukan Belanda memberi persyaratan bahwa jenazah yang dibungkus kain hitam tersebut tidak boleh dibuka, hal ini disetujui oleh Kiai Dachnan semata-mata agar jenazah dapat dibawa pulang. Kiai Dachnan akhirnya membawa jenazah Letkol Sroedji ke rumahnya di Kreongan dengan menumpang truk militer Belanda dan dikawal serdadu KNIL. Saat hendak menyucikan jenazah, Kiai Dachnan tetap membuka kain pembungkus dan beralasan kepada pengawal bahwa hal tersebut dikarenakan almarhum adalah seorang muslim. Si pengawal memang tidak mengetahui ihwal larangan membuka selubung jenazah. Saat kain dibuka, alasan larangan komandan pasukan Belanda menjadi jelas. Jenazah Letkol Sroedji dipenuhi bekas tembakan dan tusukan bayonet. (Mertowijoyo, 2015: 108). Diketahui bahwa penyiksaan yang dilakukan tentara Belanda terhadap jenazah Letkol Sroedji juga termasuk pencungkilan terhadap mata almarhum dan beberapa rua sjarri yang hilang/tidak lengkap karena dipotong (Widuatie, 2016:71).

Jenazah Letkol Mochammad Sroedji dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Kreongan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Pemakamannya dihadiri ribuan rakyat yang ingin memberikan penghormatan terakhir kepada mending. Di antara peziarah terdapat beberapa anak buahnya yang setia, salah satunya Mayor Imam Soekarto, Wakil Komandan Brigade III/Damarwulan sekaligus Wakil Komandan Sub Teritorium Besuki. Mayor Imam Soekarto sengaja datang sejak jenazah belum dikebumikan untuk memastikan kebenaran berita bahwa Letkol Sroedji telah gugur (Widuatie, 2016:77).

Sepeninggal Letkol Sroedji, perjuangan Brigade III/Damarwulan dilanjutkan oleh sisa-sisa pasukan yang tersebar di beberapa titik di Besuki. Komando Brigade III dipegang oleh

Mayor Imam Soekarto. Batalion 26 Mayor E.J. Magenda berhasil mencapai Bondowoso dan melanjutkan perlawanan terhadap Belanda. Mayor Sjafoedin bersama pasukannya, Batalion 25 membentuk *terugval basis* di Desa Sucopangepok dan bertahan hingga penyerahan kedaulatan. Namun diantara anak buah Letkol Sroedji terdapat beberapa yang menyeberang ke pihak Belanda, yaitu Mayor Abdul Rifa'i dan Kapten Bintoro, keduanya memilih bekerjasama dengan Belanda. (Mertowijoyo, 2015:110-112). Eks-Kapten Bintoro menjadi juru propaganda Belanda yang mengajak rakyat dan TNI untuk mendukung pembentukan negara boneka "Negara Jawa Timur". Sedangkan eks-Mayor Abdul Rifai yang menyerah kepada Belanda juga muncul kembali sebagai agen propaganda yang memberikan ultimatum kepada TNI dan rakyat yang berjuang untuk menyerah saja kepada Belanda (Nasution, 1979:178-182). Namun sisa-sisa Brigade III/Damarwulan memilih tetap setia pada perjuangan membela Republik Indonesia. Batalion 26 dibawah komando Mayor Ernest Julius Magenda bahkan "menjawab" ultimatum Abdul Rifai dengan mengadakan serangan mendadak terhadap kota Bondowoso pada tanggal 30 Juni 1949 malam hari (nasution, 1979:183). Perjuangan Brigade III/Damarwulan bersama rakyat yang setia pada Republik Indonesia berlangsung hingga penyerahan kedaulatan.

IX. PENUTUP

A. Kesimpulan

Letnan Kolonel Mochammad Sroedji menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagai seorang prajurit yang berada dalam suatu garis komando, Sroedji melaksanakan setiap tugas dan misi dengan jiwa besar. Hal ini dapat dilihat dari tingkat tekanan tugas yang cukup berat, seperti saat mendapat perintah *long march*/hijrah dari basis di Besuki menuju Blitar sebagai akibat Perjanjian Renville. Perintah tugas pula yang membuat Letkol Sroedji kembali memimpin pasukan ditambah keluarga pasukan melaksanakan *wingate action* menuju Besuki dalam kondisi minim logistik dan ancaman kekuatan Belanda. Secara keseluruhan tugas-tugas tersebut dapat dituntaskan dengan baik, dan hal ini membawa dampak yang signifikan terhadap tegaknya kedaulatan Republik Indonesia di front Jawa Timur.

Perjuangan Letkol Mochammad Sroedji adalah tipikal perjuangan prajurit yang mengabdikan sampai akhir. Tulisan ini tidak cukup mampu mendokumentasikan dan mencatat jasa dan sumbangsih almarhum terhadap kemerdekaan Indonesia. Apa yang dilakukan Letkol Sroedji demi bangsa dan negara dapat menjadi suri teladan serta renungan bagi generasi penerus. Kondisi bangsa yang mengalami krisis nasionalisme seharusnya menjadi pertanyaan besar, bagaimana bangsa yang memiliki putra-putri terbaik seperti Sroedji bisa keropos rasa kebangsaannya? Rekam jejak perjuangan Letkol Mochammad Sroedji akan terus aktual selama bangsa ini masih mengingat sejarahnya, masih menghargai jasa-jasa para pahlawannya dan berkomitmen melanjutkan perjuangan para pendahulu.

B. Saran

Penelitian tentang peristiwa lokal mapun tokoh lokal perlu terus dilakukan mengingat banyak sekali perjuangan kemerdekaan yang dilakukan secara sporadis dan melibatkan tokoh-tokoh lokal. Lokasi-lokasi pertempuran perlu dibuatkan monumen atau *tetenger* agar generasi penerus tahu dan dapat memetik teladan dari perjuangan para tokoh.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagan Struktur Kepegawaian Karesidenan Besuki Batalion 1 Kencong Jember 1943.
- Daliman, (2012). *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ombak.
- Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Jember, (1995). *Berita Acara Pemancangan Bambu Runcing Berbendera Merah Putih di Pusara Pelaku Pejuang 45 yang Dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Wilayah Kabupaten Jember*, Jember.
- Kardi, S., (1996). "Sejarah Perjuangan Letkol Moch. Sroedji 1945 1949, Keteladanan dan Etika Kepemimpinan" makalah disampaikan pada Pidato Dies XV dan Wisuda Sarjana IX Universitas Moch. Sroedji Jember, 8 Juni 1996.
- Komando Distrik Militer 0824, (1972). *Sejarah Kepemimpinan Almarhum Letkol Moch. Sroedji Selaku Komandan Brigade III/Damarwulan, Divisi I TNI/Jawa Timur*. Jember.
- Kuntowijoyo, (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Laporan Pertempuran KNIL. Batalion Infanteri XXIII, Kompi 4e, Arsip KITLV.
- Mertowijoyo, I. G., (2015). *Letkol. Moch. Sroedji, Jember Masa Perang Kemerdekaan*, Jakarta: Inti Dinamika Publishers.
- Nasution, A.H., (1979). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 10, Perang Gerilya Semester II*, Bandung: Angkasa.
- Nasution, A.H., (1991). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 9, Agresi Militer Belanda (cetakan ke-3)*, Bandung: Angkasa.
- Poesponegoro, M. D. dan Nugroho, N., (1993). *Sejarah Nasional Indonesia VI (edisi ke-4)*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pour, J., (2010). *Doorstoot Naar Djokja, Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer (cetakan kedua)*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, I. Toto K. dan Suko, S., (editor), (2010). *Bung Karno, Masalah Pertahanan Keamanan, Himpunan Pilihan Amanat kepada TNI/Polri*, Jakarta: Grasindo.
- Sapto, A., (2012). "Perkembangan Organisasi Militer di Jawa Timur 1945 1949." *Mozaik: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 12, No. 2.
- Sundhaussen, Ulf., (1986). *Politik Militer Indonesia 1945 1967, Menuju Dwi Fungsi ABRI*, Jakarta: LP3ES.
- Widuatie, R. E., (2016). *Biografi Moch. Sroedji, Pengorbanan Sang Patriot*, Jember (laporan penelitian).